

***COMPETITION LAW:
HARAPAN dan KENYATAAN***

Oleh

Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MHum

What is in a name?

- Competition Law (terminologi yang semakin populer);
- Antitrust Law;
- Anti-Monopoly Law;
- UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rationales ?

- Antara lain dalam bagian Menimbang UU No 5/1999 menyatakan:
 - b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
 - c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Tujuan UU No 5/1999

- **Pasal 3:**
 - a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
 - c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
 - d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Lingkup UU No 5/1999

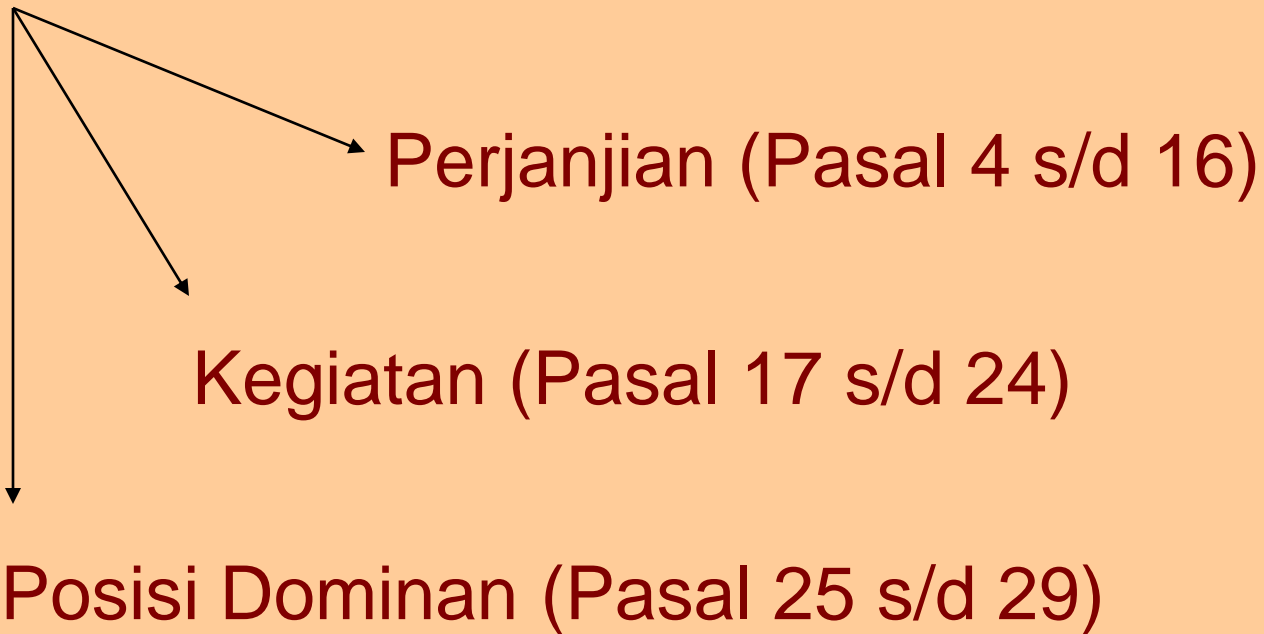
- Perjanjian yang dilarang (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup);
- Kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan);
- Posisi dominan (jabatan rangkap, pemilikan saham dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan).

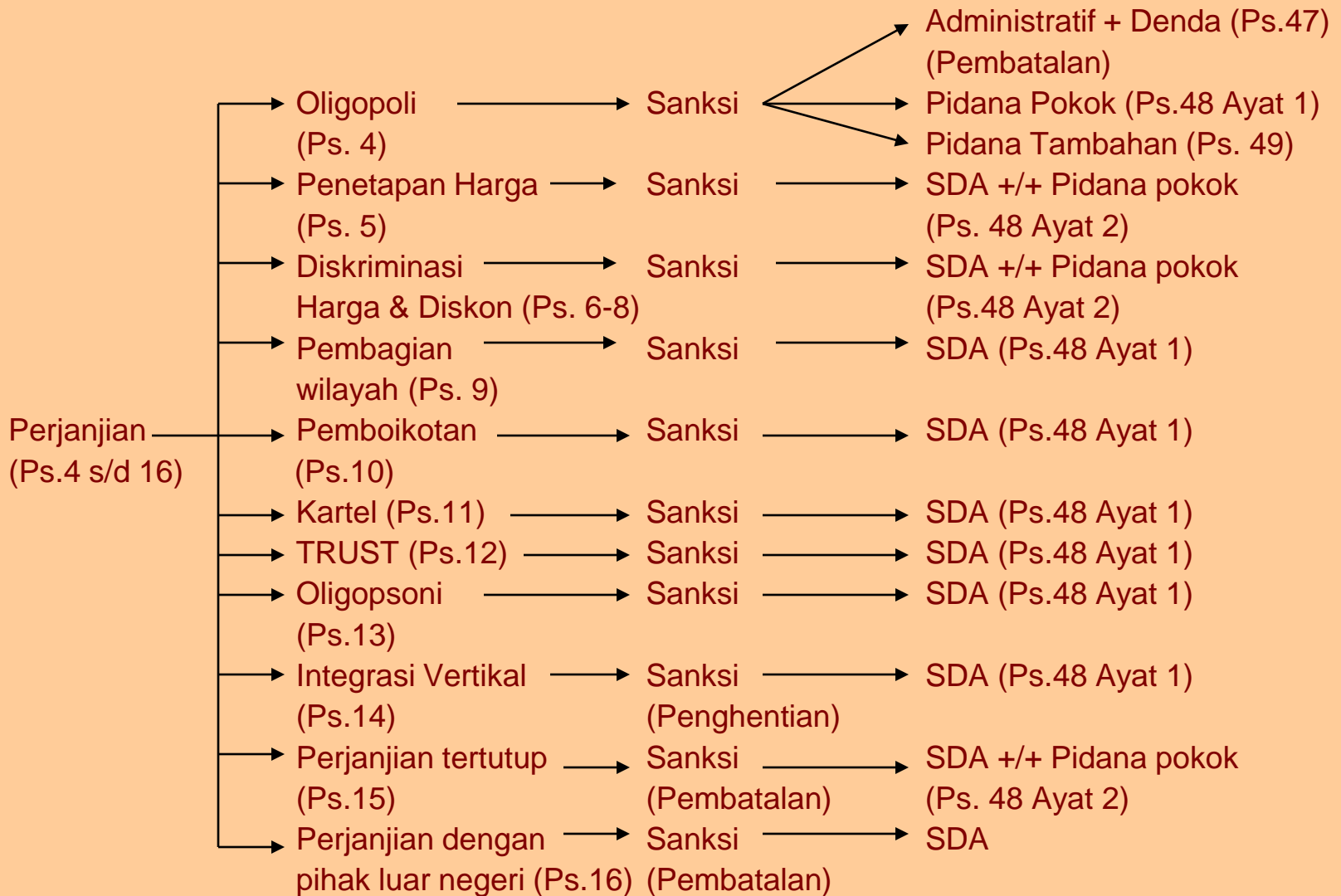
MATERI UU No 5/1999

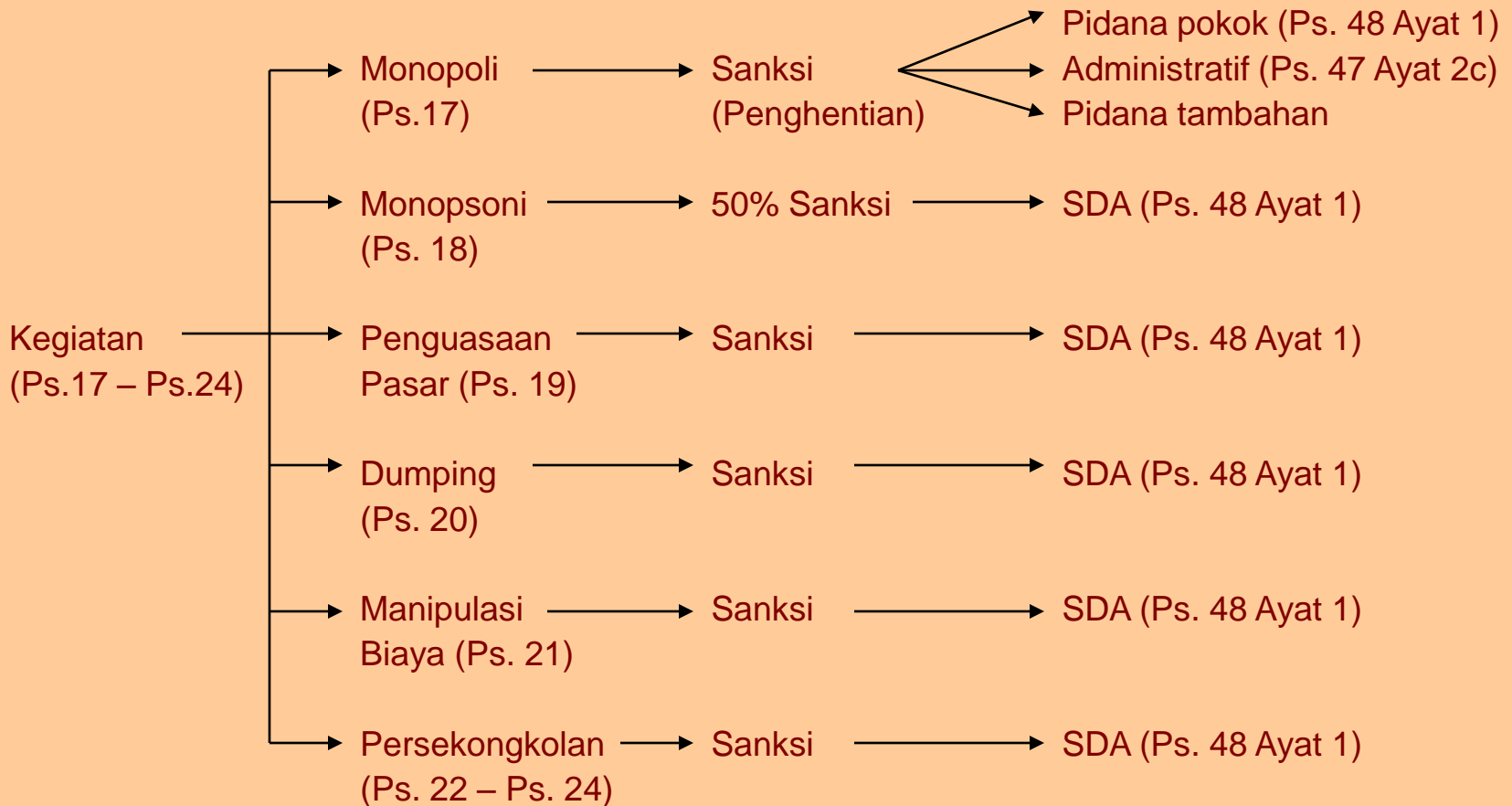
Dibagi 6 (enam) bagian pengaturan:

- 1. Perjanjian Yang Dilarang (ps. 4 – ps. 16)**
- 2. Kegiatan Yang Dilarang (ps. 17 – ps. 24)**
- 3. Posisi Dominan (ps. 25 – ps. 29)**
- 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (ps. 30 – ps. 46)**
- 5. Penegakan Hukum (ps. 47 – ps. 49)**
- 6. Ketentuan lain-lain (ps. 50 – ps. 53)**

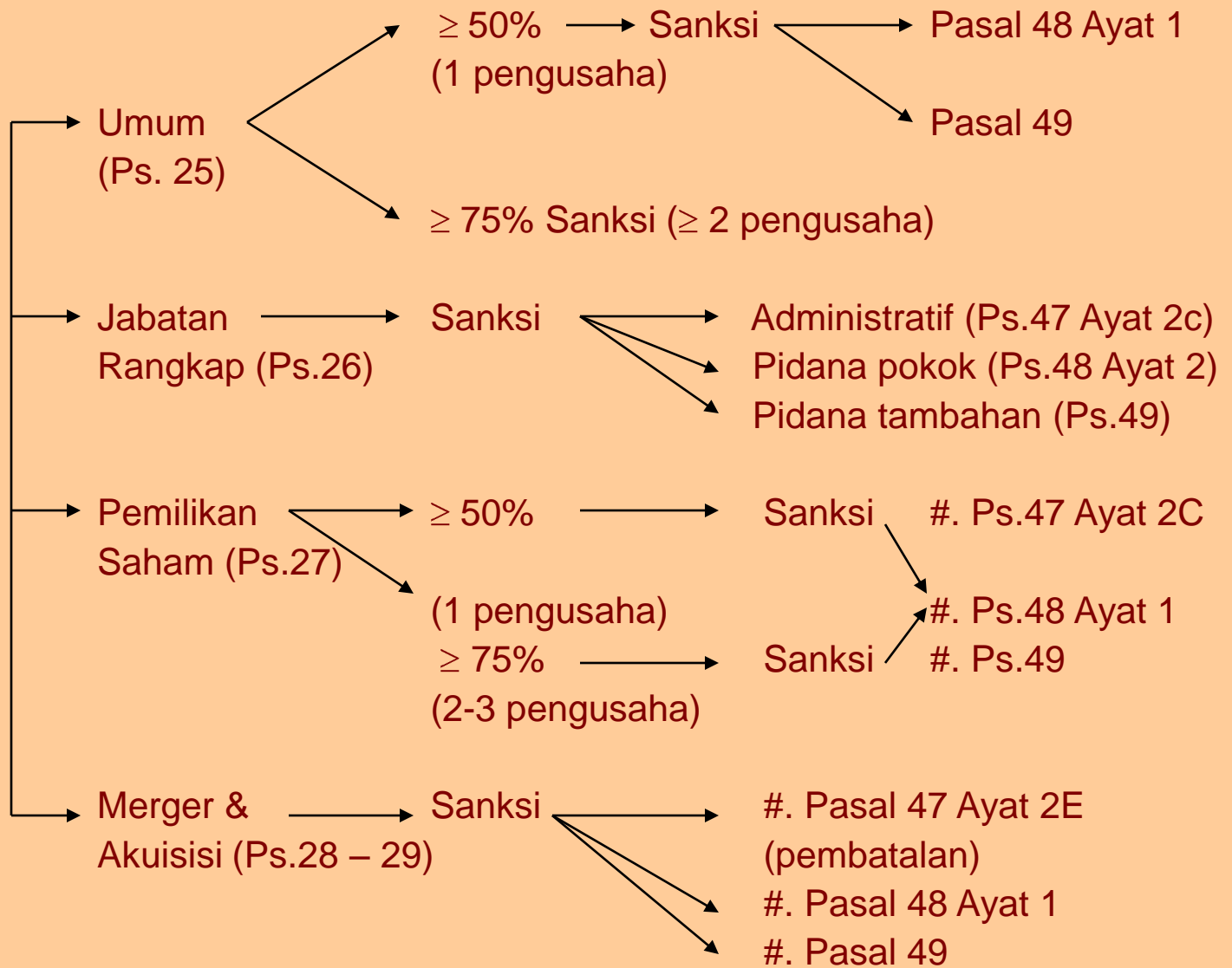
Larangan-larangan







Posisi Dominan (Ps.25 s/d Ps.29)





Basic Facts on KPPU

Anti-Monopoy 2000 App. Government: Investigates, prepares Private businesses
Commission 100 2004: Rp.23 billion cases and administers
(*Komisi*) 2005: Rp.42 billion judgements on unfair
Pengawas 2006: Rp.80 billion business practices
Persaingan
Usaha: KPPU) International donors:
Contributions in kind

(Source: Van Zorge)

Selected Decisions of the KPPU

Year	Case	Decision	Sanction
2002	Tender for Sale of Indomobil Sukses shares by IBRA at below market rates.	Guilty	Rp.270.5 billion fine shared between 8 companies. Two of the companies blacklisted from any transaction in IBRA for 2 years.
2002	Film import/distribution for Cineplex 21	Owner of Cineplex 21 found guilty of monopolizing distribution and hampering competitors. Distributors found not guilty.	Rp.1 billion fine for owner of Cineplex 21 and ordered to reduce its shares in competitors
2003	Garuda pressuring agents to use infrastructure provided by a Garuda subsidiary	Guilty	Rp.1 billion fine and ordered to stop unfair practices

(Source: Van Zorge)

Selected Decisions of the KPPU

Year	Case	Decision	Sanction
2003	Explanation of the US Audit Standard by Public Accountant Drs.Hadi Susanto and Associates (member of Price Waterhouse Coopers)	Susanto was guilty of hampering competitors	Rp.20 billion fine
2004	Tender of Security Service at Thames Pam Jaya	Guilty of conspiring in tender	Rp.1 billion fine.
2004	Divestment of two oil tankers by Pertamina	Pertamina and businesses involved found guilty of conspiring	Rp.241.3 billion fine shared between 5 companies involved
2005	Distribution Consortium of Semen Gresik	Consortium found guilty of conspiring with competitors to monopolize production and market	Rp.1 billion fine

(Source: Van Zorge)

Data Semen Nasional



POSISI CHANNEL SHARE

Stasiun Televisi	Persentase
RCTI	18
Indosiar	18
SCTV	17
Trans TV	12
TPI	11
Lativi	7
TV7	6
ANTV	5
Global TV	2
Metro TV	2
TVRI	2

Keterangan: Channel share adalah persentase saluran tertentu terhadap total jumlah penonton televisi.

Sumber: Survei Nielsen media Research di delapan kota yang dipublikasikan pada 2005

(Koran Tempo, 28 Juni 2006)

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA

- KPPU menghukum Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox karena persekongkolan (konspirasi) dalam penjualan dua buah tanker, melanggar pasal 22 UU no 5/1999.
- Pasal 22 UU No 5/1999:
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA

- Pasal 23 UU No 5/1999:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA

- PN Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU karena Pengadilan beranggapan bahwa tidak terbukti telah terjadi persekongkolan yang melanggar pasal 22 UU No 5/1999;
- MA membatalkan putusan PN Jakarta Pusat, dan dengan mengadili sendiri mengukuhkan putusan KPPU;
- Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox merencanakan untuk melakukan PK.

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA

- Beberapa soal hukum yang perlu mendapat perhatian:
 1. Hukum acara masih perlu disempurnakan karena KPPU disini sepertinya bertindak sebagai penyidik, penuntut, hakim dan eksekutor;
 2. Alat-alat bukti hanya terbatas pada yang sudah ada dan diserahkan kepada KPPU;
 3. Yurisprudensi tidak menjadi rujukan dalam pembuatan putusan.
 4. Pelatihan bagi para hakim nampaknya perlu mendapat prioritas.

PENUTUP

- The antitrust laws are designed to control the exercise of private economic power. Competition is relied upon as the primary mechanism of control, and the antitrust laws are aimed at keeping markets pure and business behavior fair.

Ernest Gellhorn